

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH



TESIS
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Disusun Oleh :
BUDIANTORO HARTONO
NIM : C4B002327

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh :
Budiantoro Hartono
C4B002327

telah disetujui
oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS.

Dra. Tri Wahyu, MSi.

TESIS
ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :
Budiantoro Hartono
C4B002327

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 Pebruari 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS.

Dra. Tri Wahyu, MSi.

Anggota Penguji

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal
Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Pebruari 2008

Budiantoro Hartono

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi ketimpangan tersebut.

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 1981 sampai dengan 2005 yang diperoleh dari Kantor Statistik, Kantor Badan Penanama Modal dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 cenderung relatif meningkat.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil investasi swasta perkapita (X_1) menunjukkan t hitung sebesar -2,362, variabel ratio angkatan kerja (X_2) menunjukkan t hitung sebesar -2,128, variabel alokasi dana pembangunan perkapita (X_3) menunjukkan t hitung sebesar 7,184 dengan angka signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 1,899, dengan angka signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita secara bersama – sama berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita sebesar 93,7 persen sedangkan sisanya sebesar 6,3 persen dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.**

Dalam kesempatan ini penyusun dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, MSc selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS. selaku pembimbing utama dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dra. Tri Wahyu, MSi. selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Diponegoro.
5. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melanjutkan studi di Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.
8. Bapak Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Bapak Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
11. Ayahanda dan Ibunda, yang memberikan restu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Istri yang tercinta, yang memberikan dorongan, semangat dalam penyusunan tesis ini
13. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin mengingat keterbatasan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sehubungan dengan hal tersebut, segala kritik dan saran terhadap tulisan ini dengan senang hati diterima demi penyempurnaan penulisan dikemudian hari

Semarang, 26 Pebruari 2008

Penyusun

Budiantoro Hartono.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	6
Tabel 4.1	Perkembangan PDRB Perkapita Per Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 hingga Tahun 2005.....	47
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan PDRB dari Tahun 2000-2005.....	49
Tabel 4.3	Jumlah dan prosentase angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah	50
Tabel 4.4	Perkembangan Realisasi Investasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 hingga Tahun 2005	53
Tabel 4.5	Perkembangan Realisasi Investasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 hingga Tahun 2005	56
Tabel 5.1	Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Dana Bantuan Pembangunan Perkapita, Ratio Angkatan Kerja, dan Investasi Perkapita di Provinsi Jawa Tengah Potensi PAD	58
Tabel 5.2	Pengujian Multikolinieritas.....	76
Tabel 5.3	Rangkuman Hasil Estimasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan tiga variabel idependen terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	34
Gambar 5.1 Uji Normalitas Data	59
Gambar 5.2 Hasil Pengujian Durbin Warson	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1981 - 1982
- Lampiran 2 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1983 - 1984
- Lampiran 3 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1985 - 1986
- Lampiran 4 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1987 - 1988
- Lampiran 5 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1989 - 1990
- Lampiran 6 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1991 - 1992
- Lampiran 7 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1993 - 1994
- Lampiran 8 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1995 - 1996
- Lampiran 9 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1997 - 1998
- Lampiran 10 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 1999 - 2000
- Lampiran 11 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 2001 - 2002
- Lampiran 12 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 2003 - 2004
- Lampiran 13 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 2005
- Lampiran 14 Indeks Data Realisasi Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah 1981 – 2005.
- Lampiran 15 Indeks Data Angkatan Kerja pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 1981-2005.
- Lampiran 16 Indeks Data Dana Bantuan Pembangunan Perkapita dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 1981-2005.
- Lampiran 17 Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dana Bantuan Pembangunan, Angkatan Kerja dan Investasi di Provinsi Jawa Tengah 1981-2005.
- Lampiran 18 Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Investasi Perkapita, Ratio Angkatan Kerja, Dana Bantuan Pembangunan Perkapita di Provinsi Jawa Tengah 1981-2005
- Lampiran 19 Output Estimasi Regresi
- Lampiran 20 Pengujian Heteroskedastisitas dengan Glejtsjer-Test.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
Bab II Tinjauan Pustaka	8
2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	9
2.3 Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah	13
2.4 Investasi	25
2.5 Angkatan Kerja	26
2.6 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Daerah	27
2.7 Indeks Williamson	28
2.8 Penelitian Terdahulu	28
2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis	31
2.10 Hipotesis	34
Bab III Metode Penelitian	35
3.1 Definisi Operasional	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Tekni Analisis	37
3.3.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah	37
3.3.2 Variabel berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah	38
3.3.3 Uji Asumsi Klasik	40
3.3.4 Uji Statistik	42

Bab V Hasil Data dan Pembahasan	57
5.1 Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	57
5.2 Pengujian Asumsi Klasik	59
5.2.1 Uji Normalitas Data	59
5.2.2 Uji Multikolinieritas	60
5.2.3 Uji Autokorelasi	61
5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	62
5.3 Pembahasan	63
Bab VI Penutup	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya melatar belakangi program padat karya berbagai pembangunan infrastruktur, seperti dalam program alam program perbaikan kampung seperti jalan, pos kampling, jalan, sungai, irigasi dan lain-lain; berbagai program jaring pengaman sosial; pembangunan jaringan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia yang diukur dengan indeks Williamson dari Tahun 1971 hingga Tahun 1990 berkisar antara 0,396 sampai 0,484. Hal ini menunjukkan ada peningkatan ketimpangan ekonomi regional tetapi masih relatif sedang. Indek ketimpangan ekonomi regional

dari Tahun 1991 hingga 1997 berkisar 0,643 sampai 0,671 berarti mengalami kenaikan cukup tinggi (Sjafrizal, 1997).

Studi empiris dari Brodjonegoro (1999) dan Mahi (2000) dengan menggunakan PDRB per kapita menurut harga konstan 1993 menunjukkan bahwa Indeks Williamson tahun 1995 tercatat sebesar 0,716. Pada tahun 1996, Indeks Williamson mengalami penurunan mencapai 0,712. Dan Tahun 1997, Indeks Williamson mengalami kenaikan mencapai 0,713 sebagai akibat dari krisis ekonomi di Indonesia (Thulus Tambunan, 2001).

Namun demikian, Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki keuntungan relatif besar dari sumber daya alam hanya 6 propinsi (20%) dan dari 350 kabupaten/kota tidak sampai 20 kabupaten/kota (5%) yang menikmati bagi hasil yang besar (Simanjuntak, 2001). Gejala tersebut sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh UNSFIR, yang menyatakan bahwa perbedaan yang mencolok antara kekayaan daerah dengan kesejahteraan masyarakatnya pada daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tersebut telah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap sesuatu yang seharusnya dinikmati, yang disebut aspirasi terhadap ketidakmerataan (*inequality*). Aspirasi ini mencerminkan adanya rasa ketidak-adilan yang muncul bila tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang kaya sama atau bahkan lebih rendah dari masyarakat Indonesia pada umumnya (Tadjoeddin, 2001). Di Kalimantan Timur sebanyak 915 desa atau 72,7 persen dari 1.295 desa tergolong miskin. Sementara di Provinsi Riau 20 % dari 4,2 juta penduduknya hidup dalam

kondisi prasejahtera dan hampir 70% angkatan kerjanya berpendidikan rendah (Harian Kompas, 7 Mei 2002).

Sedangkan perhitungan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan penelitian Tantia Hastarini dengan menggunakan data time series dari tahun 1981 hingga tahun 2000 menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini juga ditunjukkan oleh perhitungan ketimpangan ekonomi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah yakni tahun 1999 mencapai 0,75; tahun 2000 mencapai 0,78; tahun 2001 sebesar 0,76; tahun 2002 sebesar 0,77; tahun 2003 sebesar 0,80 ; tahun 2004 sebesar 0,76; dan tahun 2005 sebesar 0,76 (Bappeda, Perda No. 11, 2003).

Namun perlu juga diperhatikan nasib daerah-daerah yang secara absolut memang miskin sumber daya alam dan sumber daya lainnya (tenaga kerja yang trampil, teknologi, modal/investasi) sehingga pemerintah daerah juga *low profile* terkesan nerimo tetapi penduduk daerah-daerah tersebut semestinya mendapat perhatian lebih besar.

Ketimpangan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek *return* atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus

modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap.

Di sisi lain gelombang pencari kerja juga mengalir mengejar kesempatan ke kota-kota besar, ke daerah-daerah yang kaya potensi. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota-kota besar.

Oleh karena di kota-kota besar tersebut relatif banyak golongan ekonomi lemah dari penduduk asli ataupun dari daerah-daerah lain dapat mengakibatkan saling berebut tempat dan peluang antar kelompok daerah asal (Risfan Munir, 2003).

Untuk itulah diperlukan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Guna meningkatkan pembangunan nasional harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan Pembangunan Nasional.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah). Pembangunan daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan

daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan (Mursid Zuhri. 1998).

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan beberapa penelitian dengan menggunakan Indeks Williamson dari Tahun 1971 sampai Tahun 1997 cenderung melebar. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Indonesia semakin melebar. Sedangkan untuk ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1981 sampai Tahun 2005 juga menunjukkan semakin melebar, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yakni :

1. **Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981 – 2005?**
2. **Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981 - 2005?**
3. **Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005?**
4. **Bagaimana pengaruh alokasi dana bantuan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2005?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Secara garis besar penelitian bertujuan untuk memperoleh masukan yang lebih rinci dan diharapkan dapat memberikan nilai lebih pada

perencanaan pembangunan di provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian tujuan penelitian ini yakni

1. Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan regional berdasarkan berdasarkan Indeks Williamson (Vw) dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 - 2005.
2. Menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005.
3. Menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005.
4. Menganalisis pengaruh alokasi dana bantuan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2005.

Sedangkan manfaat penelitian ini yakni memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tentang variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih alternatif kebijakan yang akan diambil untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Dan memberikan tambahan acuan untuk peneliti berikutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Sumitro Djojohadikusumo (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irwan dan M. Suparmoko, 1988).

Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/kaya maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparat di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output yang dihasilkan. Namun demikian penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara negara maju dan negara berkembang tidak seimbang sehingga cenderung

memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok negara kaya dan negara miskin.

Di negara berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap penduduk/lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya (Todaro, 1999).

2.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Lincoln Arsyad, 1999).

Saat ini tidak ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori tersebut berkisar pada metode

dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tertentu. Secara Umum pendapat-pendapat yang mendasari bidang teori pembangunan ekonomi regional yang masing-masing mempunyai asumsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

1. Model Neo Klasik.

Model Neo Klasik mendasarkan analisa pada peralatan fungsi produksi, sama halnya dengan analisis pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok Neo-Klasik berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi. Namun demikian ada kekhususnya teori pertumbuhan regional Neo Klasik yaitu membahas secara mendalam pengaruh dari perpindahan penduduk/migrasi dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kesimpulan dari model Neo Klasik adalah terdapat hubungan antara pertumbuhan dari suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan. Kelompok Neo Klasik mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (*convergen*). Alasan dikemukakan adalah bahwa lalu lintas orang dan lalu lintas modal di negara yang sedang masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi

serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk, biasanya merupakan faktor utama yang menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah. Sedangkan di negara-negara maju, proses penyesuaian tersebut terjadi dengan lancar karena telah tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi. Kebenaran pendapat ini mula-mula diselidiki secara empiris oleh Williamson (1965).

2. Model Peyebab Kumulatif

Teori ini pada mulanya dikemukakan oleh Myrdal (1957) yang mengkritik teori Neo Klasik mengenai pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah selamanya akan menimbulkan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekulibrium (*disequilibrium*). Perbedaan utama dari teori Neo-Klasik dan teori dari Myrdal adalah, yang **pertama** menggunakan *constant return to scale* dan **kedua** menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale* berlangsung terus. Menurut Kaldor (1970) bahwa prinsip-prinsip dari peyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan. Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain. Hal ini disebut Myrdal sebagai *backwash effects*. Berdasarkan kondisi ini maka penganut teori

Cummulative Causation berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang efektif dari pemerintah.

3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis pendapatan regional akan langsung meningkat bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang.

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Keunggulan dari metode ini adalah dapat secara cepat mengetahui sektor-sektor yang menjadi andalan/basis komparatif suatu perekonomian daerah. Kelemahan model ini adalah didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menanggapi bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut

merupakan suatu permukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

2.3 Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah.

Thee Kian Wie, (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*);
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*);
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*);

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (1955). Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan berbagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah India, Srilangka serta Puerto Rico dan pada hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahap awal perkembangan (diwakili oleh PDB per kapita yang masih

rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuhnya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik (Munawar Ismail, 1995).

Model pembangunan dualistik ini (Suharto, 2001) berdasarkan artikel terkenal tentang ekonomi surplus tenaga kerja dari Artur Lewis, yang memperbaharui model klasik. Menurut model pembangunan pembangunan yang diajukan Lewis (Todaro, 1999), perekonomian terbelakang terdiri 2 sektor yaitu :

1. Sektor tradisional yaitu sektor pedesaan sub sistem yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Hal ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun.
2. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem. Perhatian utama dari model ini diarahkannya pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi dibanding industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern.

Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi para kapitalis yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Hal ini dapat meningkatkan pangsa keuntungan pada pendapatan nasional. Tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah sektor pertanian subsisten tradisional (Todaro, 1999). Distribusi fungsional berpindah dari penghasilan upah. Pola distribusi berbentuk U dari permulaan dan lebih lanjut tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan hanya menentukan berapa cepat sebuah negara melewati U.

Teori Lewis ini kemudian disempurnakan oleh Gustav Ranis dan John Fei. Model pembangunan ekonomi Ranis-Fei (Jhingan, 2000) bukan saja terperinci menunjukkan pengaruh dari perubahan produktivitas tenaga kerja di sektor modern kepada corak proses pembangunan akan tetapi menunjukkan juga akibat kemajuan tingkat produktivitas kegiatan-kegiatan di sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi yang akan tercipta.

Di dalam mengemukakan teorinya Fei dan Rei membuat asumsi sebagai berikut :

1. Terdapat sektor pertanian tradisional yang pasif dan industri yang aktif;
2. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja;
3. Di sektor modal tidak terdapat akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali;
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap;
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel;
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol, Jika penduduk

melampaui jumlah dimana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi output pertanian;

7. Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja;
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen;
9. Upah nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian, yang disebut upah institusional;
10. Pekerja masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi tersebut maka Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja menjadi 3 tahap, yaitu

1. Tahap pertama, para penganggur tersamar, yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
2. Tahap kedua, pekerja pertanian menambah output pertanian tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh. Para pekerja ini dialihkan ke sektor industri. Jika migrasi pekerja ini berlangsung terus, akan dicapai suatu titik dimana pekerja pertanian menghasilkan output yang sama dengan upah institusional.
3. Tahap ketiga, dan merupakan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Pada tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dari sektor pertanian menuju komersial.

Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian

tradisional menuju sektor industri modern. Banyak penelitian susulan yang mencoba membantah atau mendukung penemuan Kuznets tersebut. Satu dekade setelah adanya hipotesa Kuznet, Williamson membuat suatu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. Williamson (1965) menjadi orang pertama yang mencoba membuktikan hipotesis U terbalik dengan menggunakan data antar wilayah. Dengan mendasarkan analisisnya pada pengalaman empiris di 24 negara selama kurun waktu 1950-1960, ia membuktikan bahwa kesenjangan antar wilayah akan memberikan pengaruh negatif pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Williamson juga menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah bahwa pada saat pendapatan perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Implikasi yang dapat diturunkan bahwa ketimpangan pendapatan antar regional merupakan konsekuensi dari pembangunan dan akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan kedewasaan pembangunan itu sendiri. Williamson menganalisa empat faktor yang mendasari pola U terbalik dalam pengembangan wilayah yaitu : sumber daya alam, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, kebijakan pemerintah pusat. Williamson menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang berbeda akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang pada tahap awal pembangunan. Robinson (1976) dengan hipotesa-U terbalik menyimpulkan bahwa kekuatan hukum ekonomi akan menyeimbangkan kesenjangan antar daerah.

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah

tertinggal akan dengan sendirinya *konvergen* dengan daerah yang lebih maju. Para ekonom Neo Klasik seperti Solow (1956), Suan (1956) dan Meade (1961) mengajukan model pertumbuhan dengan menggunakan beberapa asumsi (Sadono Sukirno, 1981) sebagai berikut (1) Full employment; (2) Persaingan sempurna; (3) Komoditi Homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) Constant return to scale antar wilayah; (6) Supply tenaga kerja tetap; (7) Tingkat teknologi tetap;

Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi. Sementara modal bergerak sebaliknya.

Kekuatan konvergensi potensial lainnya (Glasson, 1990) antara lain alokasi sumber daya di daerah yang berangkat dari sektor upah rendah (seperti sektor pertanian) ke sektor dengan upah yang tinggi, dengan produktivitas tinggi akan menaikkan pendapatan rata-rata perkapita serta adanya ciri-ciri kematangan dalam daerah-daerah yang sudah lama berpendapatan tinggi yang dapat memperlambat kenaikan pendapatan perkapita di masa mendatang.

Salah satu kelompok hibrida dari teori pertumbuhan regional yang jelas-jelas mengakui bahwa pertumbuhan regional itu mungkin saja bersifat *divergen* dan bukannya *konvergen*, adalah *teori-teori centre-periphery* dari Hirschman, Friedman dan Myrdal (Glasson, 1990). Myrdal dan Hirschman dalam teorinya tentang kesenjangan pembangunan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan *divergensi* adalah lebih kuat daripada kekuatan *konvergensi* dalam pola pertumbuhan ekonomi. Argumen umum dari teori dapat dijelaskan dengan membandingkan peruntungan dari dua daerah, A dan B. Pada mulanya daerah A berkembang lebih cepat daripada

B, karena ia mempunyai kemanfaatan-kemanfaatan alamiah dan/atau buatan manusia. Akan tetapi bertentangan dengan banyak teori pertumbuhan, divergensi ini mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya dan proses ini malahan dapat menjadi kumulatif, dimana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Menurut Myrdal (Sadono S, 1981) dalam jangka panjang pendapatan perkapita antar daerah cenderung timpang. Perbedaan tersebut menurutnya disebabkan adanya dua faktor yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Pembangunan ekonomi antar wilayah akan menimbulkan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium. *Spread effect* adalah kekuatan yang menuju konvergensi antara daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin. Dengan bertumbuhnya daerah kaya, maka bertambah pula permintaannya terhadap produk dari daerah yang tertinggal seperti hasil pertanian dan hasil industri barang konsumsi, dengan demikian akan yang menimbulkan pertumbuhan. Myrdal menyatakan sebab-sebab kurang mampunya daerah terbelakang berkembang secepat daerah yang maju. Hal tersebut disebabkan karena keadaan *backwash effect*, yang menyebabkan daerah terbelakang menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya. Dari masa ke masa daerah yang lebih maju akan menjadi daya penarik bagi penduduk daerah terbelakang, untuk mengadakan migrasi karena adanya keyakinan untuk mendapatkan gaji yang lebih baik/ prasarana sosial yang lebih baik di daerah yang lebih maju.

Pada umumnya yang melakukan migrasi adalah kaum muda, berpendidikan dan berpengalaman cukup dan dengan demikian yang tertinggal di daerah terbelakang adalah golongan penduduk yang tingkat kecakapan maupun

produktivitas rendah sehingga menyebabkan potensi yang lebih terbatas dalam menggalakkan pembangunan.

Demikian pula karena ketidaktersediaan institusi finansial dan prospek investasi yang suram akan menggiring kapital keluar menuju daerah yang maju. Berdasarkan keadaan ini, maka penganut teori *Cummulative Causation* berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang aktif dari pemerintah.

Hirschman berkeyakinan bahwa terjadinya konsentrasi pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor di daerah maju yang mempengaruhi dan menghambat pembangunan di daerah tertinggal. Faktor-faktor yang menghambat itu dinamakan *polarization effect*, namun juga terdapat kekuatan yang bersumber di daerah maju yang akan mempengaruhi pembangunan di daerah tertinggal yang disebut *tricking down effect*, tetapi kekuatan ini biasanya jauh lebih rendah daripada *polarization effect*.

Sementara Freedman's (1966) menyatakan bahwa atas dasar kenyataan pada sejarah proses pembangunan spasial menekankan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu daerah yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana.

Perroux menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi daerah lain yang lebih lambat perkembangannya.

Teori Pusat Pengembangan (*Growth Poles Theory*) akan dapat merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah (Sjafrizal, 1983:15). Teori ini dapat menggabungkan kebijakan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. Menurut Perroux, konsep *pole decroisumce* lebih banyak menyangkut konsep *economic region* daripada *geographic region* Karena itu suatu pusat pengembangan seringkali didefinisikan sebagai suatu konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling berkaitan melalui hubungan input dan output industri utama. Konsentrasi dan saling keterkaitan adalah merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui faktor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk *agglomeration economies* yang dapat menunjang pertumbuhan dari industri-industri yang bersangkutan melalui penurunan ongkos produksi. Keuntungan aglomerasi yang merupakan kekuatan dari setiap pusat pengembangan dapat dibagi menjadi atas 3 jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Scale economies* yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya beroperasi dalam skala besar, karena ada jaminan bahan baku dan pasar.
2. *Locatization economies* yang dapat timbul akibat adanya keterkaitan antar industri, sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat dipenuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum.
3. *Urbanization economies* yang timbul karena fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi dapat dipergunakan secara bersama sehingga pembebanan ongkos

untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa bila kegiatan ekonomi yang saling berkaitan dikonsentrasikan pada suatu tempat tertentu maka pertumbuhan ekonomi dari daerah yang bersangkutan dapat ditingkatkan lebih cepat dibandingkan kalau tersebar dan berpencar. Dengan demikian bila pusat pengembangan didirikan pada suatu daerah yang relatif masih kurang berkembang dibandingkan daerah-daerah lainnya maka laju pertumbuhan pada daerah yang bersangkutan dapat ditingkatkan sehingga perbedaan kemakmuran antar wilayah secara bertahap akan tercapai. Akan tetapi kebijaksanaan tersebut tidak jarang malah menimbulkan kepincangan pembangunan wilayah yang makin tinggi.

Kebijaksanaan pusat pengembangan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dikatakan berhasil dari segi pandangan nasional tetapi gagal dalam dari sudut pembangunan wilayah. Kebijakan pusat pengembangan yang hanya tertuju pada beberapa tempat saja bila tidak hati-hati dapat memperbesar jurang kemakmuran antara penduduk yang berada di dalam pusat dan dengan yang berada di luarnya.

Teori Hechsher-Ohlin (Amirrudin, 1992:55) yang dikenal sebagai teori H-O menjelaskan pula penyebab kesenjangan antar daerah. Hechsher-Ohlin mencoba menjawab mengapa perdagangan cenderung pada suatu wilayah tertentu dan menuju pada polarisasi. Hechsher-Ohlin percaya pada *endowment factor* yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga daerah mempunyai *comparative advantage* dibanding yang lain dan ini dapat menaikkan pendapatan daerah tersebut. Hilhorst (1968) menyangkal pendapat teori H-O yang menyatakan

keunggulan comparative sebagai penyebab terjadinya perdagangan inter-regional. Menurut Hilhorst (Hilhorst dalam Amirrudin 1992), ada faktor-faktor lain sebagai penyebab perdagangan inter-regional misalnya kelancaran transportasi dan komunikasi muncul dan kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan kemudahan-kemudahan serta adanya jalinan kerjasama antar sesama rekanan usaha.. Dengan adanya transportasi dan komunikasi, faktor-faktor produksi yang immobil (tidak bergerak) diantara dua wilayah mulai hilang dan faktor *endowment* cenderung merata.

Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas - prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal, 1983:17). Dalam hal pemerataan, Rahman berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipertimbangkan melalui pelaksanaan *switching policy*. Bila menurut analisa alokasi anggaran perlu lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju. Dengan demikian unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara sekaligus.

2.4 Investasi.

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan

kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sadono Sikirno, 1985).

2.5 Angkatan Kerja.

Besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa yang disebut dengan golongan yang bekerja atau *empoymed persons*. Sebagiaian lain tergolong siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan yang disebut dengan pencari kerja/penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau *labor force* (P.J. Simanjuntak, 1985)

Namun setiap negara dapat memberikan pengertian yang berbeda mengenai definisi bekerja dan menganggur, dan definisi itu dapat berubah menurut waktu. Dalam sensus penduduk tahun 1971, orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja. Juga tergolong sebagai bekerja selama seminggu sebelum pencacahan tidak bekerja atau kurang dari dua hari tetapi mereka adalah (1) pekerja tetap pada kantoe pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok atau magkir; (2) petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap swahnya dan (3) orang yang bekerja dalam

bidang keahlian seperti dokter, konsultan, tukar cukur, dan lain-lain (P.J. Simanjuntak, 1985).

2.6 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Daerah.

Dana bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat (1988) serta Nurmanah (1989) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

2.7 Indeks Williamson.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah

digunakan rumus Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997).

2.8 Penelitian Terdahulu.

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah.

Perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Indonesia dimulai oleh Hendra Esmara (1975). Peneliti lain yang menggunakan kerangka kerja Williamson dalam mengamati kesenjangan regional telah dilakukan diantaranya oleh Uppal dan Handoko (1986), Aminudin (1992), Sjafrizal (1997), Brodjonegoro (1999) dan Mahi (2000). Studi tersebut tercantum pada Tabel 2.1 dan mendukung hipotesa U terbalik versi Williamson (Haryo Kuncoro, 2001).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Alat Pengukuran	Hasil Penelitian
1.	Hendra Esmara (1975) (Regional Income Disparities Bulletin of Indonesia Economic Studies, vol XI No. 1 Th. 1975 : 41-57)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Diluar Provinsi penghasil migas (Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah) secara umum kesenjangan antar daerah jauh lebih rendah dibanding jika termasuk daerah penghasil migas.

2.	Uppal dan Handoko (1986) (Regional Income Disparities in Indonesia, Ekonomi Keuangan Indonesia vol XXXiV No. 3 Jakarta hal 285-306)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	<p>a. Faktor yang menyebabkan kesenjangan antar daerah yaitu transfer pemerintah pusat melalui berbagai macam grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing Propinsi (DIP). Penempatan industri berskala besar dan</p> <p>b. menengah di daerah yang relatif miskin merupakan kebijakan efektif mengurangi kesenjangan. Tingginya persentase penduduk yang hidup di perkotaan tidak menyebabkan naiknya pendapatan perkapita, meskipun pada beberapa Propinsi yang tinggi PDRB per kapitanya seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan DKI Jakarta me-miliki prosentase penduduk perkotaan yang relatif tinggi Kesimpulan ini membuktikan bahwa kebijakan transmigrasi masih diper-lukan dan sekaligus menganjurkan bahwa</p> <p>c. sebaiknya industri yang beralokasi di daerah urban yang padat di Pulau Jawa di geser ke daerah yang jarang penduduknya. Ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dan variasi distribusi penguasaan faktor-faktor produksi.</p>
3.	Marisa dan Hutabarat serta Nurmanaf (1988) (Achmad, Rozary Nurmanah, 1999 : Kesenjangan Pengeluaran Pembangunan antar wilayah dan propinsi di Indonesia, konomi dan Keuangan Indonesia Vol. No. 4, 1999 hal 416-421)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan variasi distribusi peng-uasaan faktor produksi.
4.	Amiruddin Ardani (1992) (Analysis of Regional Growth and Disparity the Impac Analysis of The INPRES Project on Indonesia Deve-lopment, a Doctor disertation USA : University Of Pennslyvania Philaderphia) -> <u>tidak dipublikasikan.</u>	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Hasil perhitungan dengan migas, tanpa migas maupun penyesuaian harga, sela,a periode 1968-1993, Ardani menemukan bahwa kesenjangan antar daerah di Indonesia cenderung mengikuti kurva U terbalik.

5.	Hamsar (1997) (Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar daerah dan faktor yang mempengaruhi di Indonesia 1983-1993 Tesis S.2 UGM -> <u>tidak dipublikasikan</u>)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Deregulasi parsial berdampak negatif terhadap pemerataan, kemiskinan per-kotaan meningkat distribusi pendapatan kelompok kecil di kota turun dan di desa meningkat. Faktor penyebabnya adalah Pendapatan riil buruk tidak berubah selama periode 1985-1993. Sedangkan Pendapatan riil profesional meningkat 7,5 % per tahun.
6.	Nasyith Majidi (1997) (Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah, Prisma 3 Maret hal 3-16)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Kebijakan alokasi anggaran antar daerah di Indonesia cenderung mendorong daerah yang makin maju dan yang terbelakang menjadi makin terbelakang.
7.	Syafrizal (1997) (Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Buletin Prisma, 1997).	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Penelitian mengenai kesenjangan regional di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan menyatakan bahwa masalah pokok terjadinya kesenjangan adalah : a. Berhubungan dengan permasalahan dalam pemanfaatan SDA yang tersedia b. Menyangkut masalah sosial budaya yang timbul dari tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. c. Ketiga mengenai pengalokasian anggaran pembangunan.
8.	Wisanggono (1998) (Analisa Perubahan Struktur Perekonomian dan Kesenjangan di propinsi Lampung; Tesis S.2 UGM)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Menyatakan bahwa tahap awal pembangunan kesenjangan antar daerah relatif kecil kemudian dalam proses pembangunan kesenjangan cenderung meningkat kemudian menurun lagi.
9.	Jati (1999) (Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah. Tesis S.2 UGM-> tidak dipublikasikan.	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson alat analisis PAM (Partial Adjustment Model)	Faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan pembangunan antar daerah di Propinsi Jawa Tengah diantaranya adalah a. Pengeluaran pembangunan b. Prosentase Industri c. Kesenjangan pada tahun sebelumnya.
10.	Eko Prasetyo (1999) (Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan antar Daerah di DI Yogyakarta Tesis S.2 UGM)-> tidak dipublikasikan.	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pembangunan antar daerah di DIY adalah : a. Prosentase Industri b. Prosentase Pertanian c. Prosentase Inpres Dati II
11.	Andiran Smith (2000) (Ethnicity, Economic Polarization and Regional Inequality Shouthern Slovakia, Growth and Change)	Pendapatan per kapita	Penyebab kesenjangan adalah perbedaan produktivitas yang diukur dengan GDP Regional dibagi dengan Angkatan Kerja serta Variasi Angkatan Kerja Regional
13.	Brodjonegoro (1999) dan Mahi (2000)	Pendapatan per kapita dengan Indeks Williamson	Kesenjangan terjadi akibat krisis ekonomi tahun 1997.

2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada dasarnya pembangunan merupakan perubahan variabel-variabel seperti penduduk, pendapatan perkapita, output selama kurun waktu tertentu dalam suatu daerah yang dibatasi secara jelas. Namun dalam proses pembangunan ekonomi masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional yang tidak dapat dihindari mengingat adanya perbedaan kekayaan sumber daya yang berbeda antar daerah dan dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi yang berbeda. Bagi daerah yang terlebih dulu membangun sudah barang tentu lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana misalkan iklim usaha yang baik, jasa perbankan yang baik, sehingga menarik minat investor untuk mengadakan investasi. Proses tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah sebenarnya akibat dari proses pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan atas penyebab ketimpangan regional dan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah dari tahun ke tahun cenderung melebar maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran penelitian yakni ketimpangan pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh investasi swasta, angkatan kerja dan alokasi dana bantuan pembangunan daerah.

Investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing antar daerah dapat mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Artinya dengan adanya peningkatan investasi swasta akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun.

Jumlah angkatan kerja yang ada dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan. Dengan adanya angkatan kerja yang meningkat berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan.

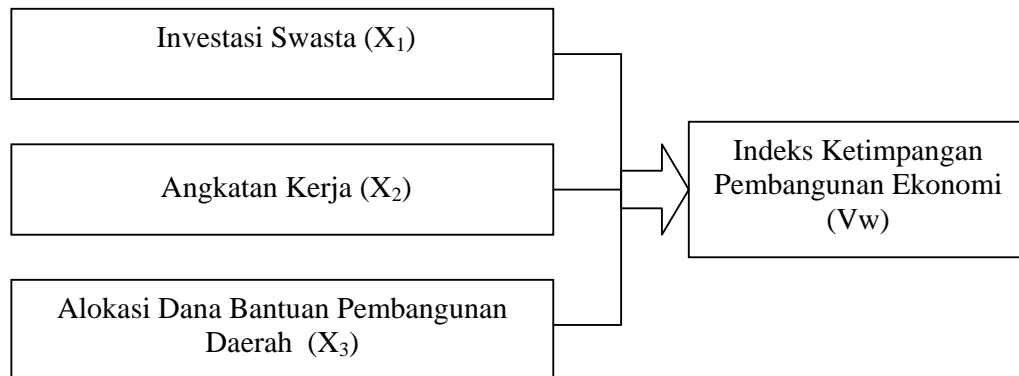
Jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Berarti semakin meningkat angkatan kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan dibukanya lapangan kerja baru tentu akan menyerap tenaga kerja baru sehingga jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Sehingga ada penyerapan angkatan kerja ini yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa lebih besar yang kemudian mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya, dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan ekonomi akan menurun.

Keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Namun pada kenyataannya potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat (1988) serta Nurmanah (1989) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) dapat dilihat pada gambar 2.1, yakni

Gambar 2.1

Hubungan tiga variabel independen terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.



2.10 Hipotesis.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Investasi swasta berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi;
- H2 : Angkatan kerja berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi;
- H3 : Bantuan pembangunan Kab./Kota berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi;

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel.

Untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan suatu definisi operasional variabel, yakni :

a. Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1981 sampai tahun 2005. Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$.

b. Investasi Swasta Perkapita.

Investasi swasta diperoleh dari jumlah realisasi investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) ditambah dengan realisasi investasi asing (Penanaman Modal Asing). Untuk memperoleh investasi swasta perkapita diukur dari jumlah realisasi investasi swasta dibagi dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Dan investasi swasta dinyatakan dalam ribuan rupiah.

c. Ratio Angkatan Kerja.

Angkatan kerja diukur dari jumlah penduduk dari usia 10 tahun sampai dengan 65 tahun, yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupaun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab,

misal menunggu panen, pegawai cuti dan sejenisnya. Disamping itu mereka tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk pula dalam angkatan kerja (BPS Provinsi Jawa Tengah). Untuk memperoleh ratio angkatan kerja diukur dari jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, yang dinyatakan dalam persentase.

d. Alokasi Dana Bantuan Perkapita.

Alokasi Bantuan Pembangunan diukur dari jumlah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah dihitung berdasarkan kouta untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan alokasi bantuan pembangunan perkapita yang diukur dari jumlah alokasi bantuan pembangunan dibagi dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data penduduk, data PDRB Propinsi Jawa Tengah, data PDRB per kabupaten/kota, data investasi swasta, data angkatan kerja, alokasi data bantuan pembangunan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1981 s/d 2005.

3.3 Teknik Analisis.

3.3.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan pembangunan, dapat diamati dengan menggunakan indeks ketimpangan pembangunan antar

daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus sebagai berikut (Safrizal, 1997) :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < V_w < 1 \quad \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

V_w = Indeks Williamson.

f_i = Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

n = Jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah

y_i = Pendapatan per kapita masing-masing Kabupaten/Kota.

\bar{y} = Rata-rata pendapatan per kapita di Propinsi Jawa Tengah.

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

3.2.2 Variabel berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah.

Guna memperoleh hasil dari variabel investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, maupun alokasi dana bantuan pembangunan perkapita di Provinsi Jawa Tengah, maka untuk masing-masing variabel tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Untuk mengukur variabel investasi swasta per kapita digunakan rumus (Hg. Suseno, 1990) :

$$X_1 = \frac{\sum I}{\sum Pd} \dots\dots\dots(2)$$

dimana :

ΣI = Jumlah realisasi Investasi di Provinsi Jawa Tengah

ΣPd = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Dan untuk mengukur ratio angkatan kerja diukur dengan rumus (Hg. Suseno, 1990) :

$$X_2 = \frac{\sum Ak}{\sum Pd} \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

ΣAk = Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah

ΣPd = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Dan untuk mengukur Dana Bantuan per kapita diukur dengan rumus (Hg. Suseno, 1990) :

$$X_3 = \frac{\sum Dbt}{\sum Pd} \dots\dots\dots(4)$$

dimana :

ΣDbt = Jumlah Realisasi Dana Bantuan di Provinsi Jawa Tengah

ΣPd = Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Dalam menganalisis hubungan antara ketimpangan yang disebabkan oleh investasi swasta, angkatan kerja pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah alokasi dana bantuan pembangunan daerah maka digunakan data time series (Gujarati, 1995). Dengan model ini diharapkan akan diketahui pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi) yang berguna dalam perencanaan pembangunan.

Dari keempat variabel tersebut dapat disusun suatu fungsi Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yakni :

$$Vw = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(5)$$

Dari persamaan (5) indeks ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut merupakan suatu persamaan non linear yakni :

$$Vw_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \mu_t \dots\dots\dots(6)$$

dimana :

Vw = Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah.

X_1 = Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah per kapita.

X_2 = Ratio Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

X_3 = Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Daerah per kapita di Provinsi Jawa Tengah.

α_0 = konstanta.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien masing-masing dari X_1, X_2, X_3

t = tahun.

μ = faktor gangguan.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik.

Agar mendapatkan prediktor yang tidak bias maka diperlukan evaluasi terhadap dipenuhinya asumsi dari regresi linier klasik yaitu : asumsi normalitas, tidak terdapat autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedasitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot*, yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan

membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (Gujarati, 2003). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam distorsi atau gangguan u_i . Dengan kata lain unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur distorsi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun.

Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi ini dilakukan dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson (DW test). Jika DW hitung terletak lebih kecil dari dL terjadi autokorelasi positif, di antara dL dan dU tidak dapat diputuskan, di antara $dU < DW < 4-dU$ maka bebas autokorelasi, di antara $4-dU$ dan $4-dL$ maka tidak dapat diputuskan, lebih dari $4-dL$ maka terjadi autokorelasi negatif (Gujarati, 2003)

Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Sumarno, 2003; Gujarati, 2003). Pengujian asumsi klasik Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas (Ghozali, 2005; Gujarati, 2003).

Asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*Disturbance*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastisitas, yaitu semua standar error mempunyai varian yang sama. Pengujian terhadap gejala Heteroskedastisitas digunakan *Glejster Test* (Gujarati, 2003) yaitu dengan cara meregres nilai residual absolute (sebagai variabel terikat) dari perhitungan regresi awal dengan semua variabel bebasnya. Bila pengujian secara statistik dari hasil regresi tidak signifikan, ini berarti dalam model tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas dengan demikian menerima hipotesis homoskedastisitas dan sebaliknya.

3.3.4 Uji Statistik.

Untuk menguji apakah variabel penyebaran investasi swasta, bantuan pembangunan, angkatan kerja serta kondisi krisis ekonomi berpengaruh atau tidak terhadap kesenjangan akan diuji dengan uji-t dan uji-F. Pengujian hipotesis secara statistik dinyatakan dengan hipotesa nol yang disebut H_0 . Hipotesa nol diuji terhadap hipotesa alternatif yang dinyatakan H_a .

Pengujian hipotesa berkenaan dengan prosedur untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis.

1. Uji Parsial

Prosedur pengujian hipotesis diperlukan untuk menguji kebenaran atau dugaan sementara H_0 dan hipotesis alternatif (H_a). kemudian penentuan taraf uji (significancy level) misal 1 %, 5 % atau 10 %. Uji parsial bertujuan untuk membuat kesimpulan mengenai pengaruh masing-

masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). kemudian untuk menerima atau menolak H_0 dibuat atas dasar nilai statistik uji-t , yang diperoleh dari data yang dimiliki.

$$t_{hit} = \frac{\beta_i}{SD \beta_i} \dots\dots\dots(6)$$

Dimana :

β_i = penaksir koefisien β_i

SD β_i = standar deviasi β_i

N = jumlah observasi

K = jumlah parameter dalam model termasuk intersep, dengan derajat keyakinan dan derajat kebebasan $df = n - k$ tertentu.

Jika $t_{hit} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti variasi-variasi variabel X_i mampu mempengaruhi Variabel Y_i

2. Pengujian secara serentak (Uji simultan)

Pengujian semua koefisien penaksir regresi secara serentak dilakukan

dengan $\dots \square$

$$F_{hitung} = \frac{(R^2 / k - 1)}{((1 - R^2) / n - k)} \dots\dots\dots(7)$$

dimana :

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter dalam model termasuk intersep, dengan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan $df = (k-1; n-k)$ tertentu.

Jika $F_{hit} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa semua variabel penjelas yang digunakan secara serentak bersama-sama dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara nyata.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.

Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah, tidak hanya dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto akan tetapi juga dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. Perkembangan pendapatan perkapita di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan. Selama kurun waktu 1981 hingga 2005 PDRB perkapita per Kabupaten/Kota juga mengalami kenaikan. Namun jika dilihat pada tabel 4.1 terdapat PDRB perkapita per Kabupaten/Kota tertinggi untuk tahun 1981 yakni Kabupaten Kudus sebesar Rp 1.612.208,51 diikuti Kota Semarang Rp 1.380.140,27; Kota Pekalongan Rp 1.008.325,84; Kota Magelang sebesar Rp 907.488,35. Dan PDRB perkapita per Kabupaten/Kota terkecil untuk tahun 1981 yakni Kabupaten Klaten sebesar Rp 181.618,51

Sedangkan pada tahun 2005 PDRB perkapita per Kabupaten/Kota tertinggi yakni Kabupaten Kudus sebesar Rp 9.162.761,66 diikuti Kabupaten Cilacap Rp 9.040.572,72; dan Kota Semarang Rp 8.058.647.,23. Untuk PDRB per kapita per Kabupaten/Kota terendah yakni Kabupaten Blora sebesar Rp 1.307.941,33. Sementara untuk rata-rata PDRB Perkapita Pertahun dari tahun 1981 hingga 2005 cenderung bervariasi. Namun jika dilihat juga terdapat rata-rata PDRB perkapita per Kabupaten/Kota ada yang tinggi yakni Kabupaten Kudus sebesar Rp 4.186.458,54 diikuti Kabupaten Cilacap Rp 3.449.610,93; dan Kota Semarang sebesar Rp 3.537.324.,81. Dan rata-rata PDRB perkapita per Kabupaten/Kota terendah yakni Kabupaten Tegal sebesar Rp 682.291,39; Kabupaten Grobogan sebesar Rp 682.729,43.

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa PDRB perkapita dari kurun waktu 1981 hingga 2005 untuk per Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah masih terjadi

ketidakmertaan pendapatan, bahkan secara rata-rata PDRB perkapita per Kab./Kota juga menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang diterima oleh setiap orang.

Tabel 4.1
Perkembangan PDRB Perkapita Per Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 hingga Tahun 2005

No.	Kabupaten / Kota	PDRB Perkapita 1981	PDRB Perkapita 2005	Rata-Rata PDRB Perkapita Tahunan Dari 1981-2005
1	Kab. Cilacap	476.940,93	9.040.572,72	3.449.610,93
2	Kab. Banyumas	467.824,79	1.784.469,14	762.657,36
3	Kab. Purbalingga	502.950,19	1.652.820,95	826.931,78
4	Kab. Banjarnegara	530.213,33	1.793.564,30	1.012.552,70
5	Kab. Kebumen	629.890,70	1.277.164,35	841.776,84
6	Kab. Purworejo	524.943,24	2.471.742,93	990.692,68
7	Kab. Wonosobo	331.670,96	1.471.950,72	702.767,61
8	Kab. Magelang	489.917,84	2.032.500,30	942.471,99
9	Kab. Boyolali	656.597,19	2.844.458,20	1.187.788,92
10	Kab. Klaten	181.618,51	2.745.482,06	1.066.681,26

11	Kab. Sokoharjo	737.164,50	3.722.060,56	1.483.983,67
12	Kab. Wonogiri	321.527,76	1.768.280,14	736.727,00
13	Kab. Karanganyar	706.060,32	3.848.263,63	1.545.822,77
14	Kab. Sragen	432.702,05	2.010.765,03	836.467,00
15	Kab. Grobogan	420.649,06	1.401.076,25	682.729,43
16	Kab. Blora	548.779,35	1.307.941,33	822.127,01
17	Kab. Rembang	594.898,31	1.852.470,63	969.803,39
18	Kab. Pati	488.622,81	2.423.301,34	970.020,83
19	Kab. Kudus	1.612.208,51	9.162.761,66	4.186.458,54
20	Kab. Jepara	527.375,09	2.490.182,20	1.077.516,78
21	Kab. Demak	445.669,15	1.745.492,06	832.904,61
22	Kab. Semarang	470.588,96	4.189.797,52	1.413.309,97
23	Kab. Temanggung	522.472,04	1.964.158,16	952.468,81
24	Kab. Kendal	654.626,15	3.310.024,43	1.642.361,48
25	Kab. Batang	547.835,90	1.895.958,02	1.034.967,89
26	Kab. Pekalongan	537.459,41	2.199.616,98	1.067.743,95
27	Kab. Pemasang	454.451,65	1.420.040,22	772.555,30
28	Kab. Tegal	385.356,99	1.401.874,29	682.291,39
29	Kab. Brebes	547.733,15	1.841.321,11	877.088,31
30	Kota Magelang	907.488,35	4.516.117,47	2.042.296,55
31	Kota Surakarta	798.569,06	4.995.808,07	2.245.302,24
32	Kota Salatiga	825.707,38	2.796.612,52	1.710.316,33
33	Kota Semarang	1.380.140,27	8.058.647,23	3.537.324,81
34	Kota Pekalongan	1.008.325,84	3.457.453,74	1.722.268,31
35	Kota Tegal	866.258,72	2.081.989,52	1.409.782,59
	Jumlah PDRB Perkapita	615.292,53	2.942.192,57	1.343.958,17

Sumber : Jawa Tengah dalam angka Tahun 1981 s/d Tahun 2005, BPS, data diolah.

4.2 Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang besar bagi suatu negara tidak otomatis menjadi modal pembangunan, bahkan dapat pula menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya (Hg. Suseno, 1900 : 104). Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berdampak pada usia kerja yang mempengaruhi pertumbuhan maupun jumlah angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, baik jumlah maupun mutunya. Melalui pembangunan ketenagakerjaan diharapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah pengangguran. Faktor yang mempengaruhi perkembangan

ketenagakerjaan yakni kondisi perekonomian suatu negara, kebijakan pemerintah serta perkembangan teknologi (BPS, 2000 : 62). Perkembangan elastisitas kesempatan kerja pada periode 2000 – 2005 di Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi PDRB serta perkembangan kesempatan kerja. Selama kurun waktu 2000-2005 rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 4,30 % per tahun. Jika dimati dari tabel 4.2 pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 mencapai 3,90 % hingga tahun 2002 mengalami penurunan mencapai 3,55 %. Sedangkan pada tahun 2003 mengalami peningkatan mencapai 4,98 % hingga tahun 2005 sebesar 5,35 % (tabel 4.2).

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB dari Tahun 2000-2005
Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2000	3,90
2001	3,59
2002	3,55
2003	4,98
2004	5,13
2005	5,35

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2000-2005

4.3 Perkembangan Angkatan Kerja

Sedangkan jumlah angkatan kerja antara daerah di Provinsi Jawa Tengah relatif bervariasi dan tentunya hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk di daerah. Persentase tertinggi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun

1981 adalah Kabupaten Cilacap 5,57 % diikuti oleh Kabupaten Klaten 4,93 %; Kabupaten Wonogiri 4,67 %; Kabupaten Brebes 4,61 %. Persentase terendah pada tahun 1981 Kota Tegal 0,23 %; Kota Salatiga 0,29 %; Kota Magelang 0,52 % dan Kota Pekalongan sebesar 0,54 % (tabel 4.3).

Sedangkan pada tahun 2005 angkatan kerja tertinggi pada Kabupaten Brebes 5,43 % diikuti Kabupaten Cilacap 4,47 %; Kabupaten Banyumas 4,34 %; Kabupaten Grobogan 4,33 %; Kota Semarang 4,18 %; dan Kabupaten Tegal 4,091%. Persentase terendah pada tahun 2005 Kota Magelang 0,42 %; Kota Salatiga 0,55 %; Kota Tegal 0,76 % dan Kota Pekalongan 0,90 % (tabel 4.3).

Tabel 4.3
Jumlah dan prosentase angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Angkatan Kerja			
		Tahun 1981	%	Tahun 2005	%
1	Kab. Cilacap	855.676	5,57	758.481	4,47
2	Kab. Banyumas	617.793	4,02	735.363	4,34
3	Kab. Purbalingga	381.559	2,48	411.460	2,43
4	Kab. Banjarnegara	420.930	2,74	464.644	2,74
5	Kab. Kebumen	530.624	3,45	543.633	3,21
6	Kab. Purworejo	520.002	3,38	361.276	2,13
7	Kab. Wonosobo	410.311	2,67	421.916	2,49
8	Kab. Magelang	685.698	4,46	594.218	3,50
9	Kab. Boyolali	548.801	3,57	538.369	3,18
10	Kab. Klaten	757.634	4,93	641.839	3,79
11	Kab. Sokoharjo	390.985	2,54	450.370	2,66
12	Kab. Wonogiri	718.326	4,67	571.816	3,37
13	Kab. Karanganyar	456.586	2,97	477.742	2,82
14	Kab. Sragen	525.612	3,42	465.321	2,74
15	Kab. Grobogan	580.669	3,78	734.860	4,33
16	Kab. Blora	419.185	2,73	457.162	2,70
17	Kab. Rembang	270.253	1,76	300.328	1,77
18	Kab. Pati	598.459	3,89	640.292	3,78
19	Kab. Kudus	269.935	1,76	424.601	2,50
20	Kab. Jepara	405.455	2,64	550.936	3,25
21	Kab. Demak	449.290	2,92	508.419	3,00
22	Kab. Semarang	449.002	2,92	535.250	3,16
23	Kab. Temanggung	351.627	2,29	412.864	2,44
24	Kab. Kendal	429.216	2,79	476.284	2,81
25	Kab. Batang	317.972	2,07	360.716	2,13
26	Kab. Pekalongan	455.711	2,96	435.249	2,57
27	Kab. Pemasang	232.030	1,51	648.709	3,83

28	Kab. Tegal	681.936	4,44	692.815	4,09
29	Kab. Brebes	709.374	4,61	921.376	5,43
30	Kota Magelang	79.202	0,52	71.794	0,42
31	Kota Surakarta	251.440	1,64	265.686	1,57
32	Kota Salatiga	45.354	0,29	92.746	0,55
33	Kota Semarang	439.015	2,86	708.157	4,18
34	Kota Pekalongan	83.761	0,54	151.836	0,90
35	Kota Tegal	35.913	0,23	128.104	0,76
	Jumlah	15.375.336	100	16.954.632	100
	Penduduk	25.564.361,00		33.126.475,00	
	Ratio Angkatan Kerja	60		51	

Sumber : Jawa Tengah dalam angka Tahun 2001 dan Tahun 2006, BPS, data diolah.

Namun demikian jika diamati tabel 4.3 jumlah angkatan kerja tahun 1981 dan 2005 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan per kabupaten/kota ada 16 yang mengalami penurunan dan 19 daerah mengalami kenaikan baik untuk kabupaten/kota atau jumlah angkatan kerja untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 1981 mencapai 15.375.336 dan tahun 2005 sebesar 16.954.632 jiwa. Sedangkan ratio angkatan pada tahun 1981 mencapai 60 % dan tahun 2005 mencapai 51 % berarti mengalami penurunan sebesar 9 %.

4.4 Investasi Swasta

Dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, masih diperlukan modal sebagai tambahan investasi pada setiap tahunnya. Tambahan investasi dapat berasal dari investasi pemerintah melalui alokasi anggaran pembangunan, dunia usaha/swasta maupun masyarakat. Investasi swasta dari dunia usaha atau Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) adalah investasi yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan, antara lain digunakan untuk pembelian mesin-mesin dan perakitan produksi.

Besarnya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing antar daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi. Adapun Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami

kenaikan. Pada tabel 4.4 menunjukkan investasi per Kabupaten / Kota tertinggi pada tahun 1981 yakni Kota Surakarta Rp 157.635.000.000. Dan investasi pada tahun 1981 yang terendah yakni Kabupaten Semarang Rp 366.000.000. Sedangkan investasi perkapita per Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 15.247.448.

Selanjutnya pada tahun 2005 juga terdapat Kabupaten/Kota yang mendapat investasi perkapita terbesar yakni Kabupaten Kendal sebesar Rp 503.308.000.000; diikuti Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 417.676; Kabupaten Pati sebesar Rp 161.775.000.000. Sedangkan investasi perkapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar Rp 56.741.685, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 41.494.237.

Sementara secara rata-rata investasi selama kurun waktu 1981 hingga 2005 juga ada Kab./Kota yang mendapat investasi tertinggi yakni Kota Semarang sebesar Rp 820.337.000.000; dan Kabupaten/Kota yang mendapat rata-rata investasi terendah yakni Kota Tegal sebesar Rp 500.000.000.

Dengan demikian investasi perkapita untuk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah baik dari tahun ke tahun maupun secara rata-rata pertahun cenderung tidak merata.

Tabel 4.4
Perkembangan Realisasi Investasi Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1981 hingga Tahun 2005

No.	Kabupaten / Kota	Investasi (jutaan rupiah)		Rata-rata Pertahun (jutaan rupiah)
		Tahun 1981	Tahun 2005	1981 s/d 2005
1	Kab. Cilacap	78.522	4.949	516.235
2	Kab. Banyumas	0	23.456	3.098
3	Kab. Purbalingga	0	4.622	3.970
4	Kab. Banjarnegara	0	0	2.476
5	Kab. Kebumen	0	0	49.070
6	Kab. Purworejo	0	0	411.124
7	Kab. Wonosobo	0	0	13.752
8	Kab. Magelang	0	0	22.780
9	Kab. Boyolali	0	0	33.302
10	Kab. Klaten	0	29.775	9.622
11	Kab. Sokoharjo	0	103.979	78.524
12	Kab. Wonogiri	0	0	27.005
13	Kab. Karanganyar	0	76.839	192.901
14	Kab. Sragen	0	4.162	44.038
15	Kab. Grobogan	0	0	46.638
16	Kab. Blora	0	0	6.643
17	Kab. Rembang	0	0	24.789
18	Kab. Pati	0	161.775	42.511
19	Kab. Kudus	0	0	16.042
20	Kab. Jepara	0	26.650	186.469
21	Kab. Demak	0	11.000	35.043
22	Kab. Semarang	366	73.382	144.326
23	Kab. Temanggung	0	70.000	9.466
24	Kab. Kendal	0	503.308	399.705
25	Kab. Batang	451	0	47.229
26	Kab. Pekalongan	159	417.676	45.203
27	Kab. Pemalang	0	0	38.519
28	Kab. Tegal	0	164.630	26.178
29	Kab. Brebes	0	0	60.520
30	Kota Magelang	0	0	8.273
31	Kota Surakarta	157.635	36.414	54.152
32	Kota Salatiga	4.566	89.644	48.952
33	Kota Semarang	148.092	59.914	820.337
34	Kota Pekalongan	0	7.478	15.131
35	Kota Tegal	0	9.999	500
	Jumlah	389.791	1.879.652	3.484.520
	Penduduk	25.564,36	33.126,48	4.169,06
	Perkapita	15,247	56,742	835,805

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jateng Tahun 1981 s/d Tahun 2005, data diolah

4.5 Bantuan Pembangunan

Bantuan pembangunan bagi Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pengeluaran pembangunan Pemerintah Pusat.

Bantuan pembangunan daerah tersebut diharapkan berperan mendukung pembangunan daerah. Arah bantuan dana ini adalah agar dapat meningkatkan kapasitas manusia dalam membangun, melakukan akumulasi kemampuan masyarakat dan proses pemupukan potensi dan modal, serta mendorong perubahan struktur sosial budaya dan ekonomi menuju kehidupan yang lebih baik.

Untuk itulah guna memberikan gambaran perkembangan bantuan pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.5. Selama kurun waktu 1981 hingga 2005 bantuan pembangunan perkapita per Kabupaten/Kota juga mengalami kenaikan. Pada tabel 4.4 untuk tahun 1981 terdapat Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terbesar untuk setiap orang yakni Kabupaten Cilacap sebesar Rp 8.033.393.000; diikuti Kota Surakarta sebesar Rp 2.084.198.000; dan Kota Semarang sebesar Rp 2.904.166.000. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mendapat dana bantuan pembangunan yang terkecil yakni Kota Salatiga Rp 163.254.000. Dan dana bantuan pembangunan perkapita di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1.211.000.

Sedangkan pada tahun 2005 terdapat juga Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terbesar yakni Kabuapten Cilacap sebesar Rp 22.041.724.000. Dan Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terkecil yakni Kota Salatiga Rp

5.019.392.000. Serta secara rata-rata pertahun Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terbesar yakni Kabupaten Cilacap sebesar Rp 12.935.976.000 dan Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terkecil yakni Kota Tegal sebesar Rp 3.999.794.000. Untuk dana bantuan pembangunan perkapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 mencapai Rp 15.477.000.

Dengan demikian nampak bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dari kurun waktu 1981 hingga 2005 tidak merata, hal ini ditunjukkan adanya daerah yang menerima bantuan relatif tinggi dan relatif rendah.

Tabel 4.5
Perkembangan Realisasi Dana Bantuan Perkapita Per Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 hingga Tahun 2005

No.	Kabupaten / Kota	Dana Bantuan	Rata-rata (ribuan rupiah)
-----	------------------	--------------	------------------------------

		Pertahun		
		Tahun 1981	Tahun 2005	1981 s/d 2005
1	Kab. Cilacap	8.033.393	22.041.724	12.935.976
2	Kab. Banyumas	523.064	21.663.073	12.305.857
3	Kab. Purbalingga	441.671	15.161.286	8.451.347
4	Kab. Banjarnegara	412.758	15.285.750	8.763.327
5	Kab. Kebumen	1.099.000	17.800.463	10.641.678
6	Kab. Purworejo	564.123	15.766.817	8.229.737
7	Kab. Wonosobo	442.281	13.648.248	7.254.393
8	Kab. Magelang	1.510.787	16.933.320	9.330.660
9	Kab. Boyolali	501.104	14.931.981	8.960.420
10	Kab. Klaten	901.338	16.897.241	9.470.121
11	Kab. Sokoharjo	529.971	14.314.132	7.044.045
12	Kab. Wonogiri	620.099	18.224.933	10.527.393
13	Kab. Karanganyar	325.664	13.598.003	7.158.652
14	Kab. Sragen	507.033	15.192.299	8.815.125
15	Kab. Grobogan	509.512	16.766.580	10.272.106
16	Kab. Blora	582.731	14.358.811	7.532.048
17	Kab. Rembang	255.827	11.134.660	6.098.198
18	Kab. Pati	830.440	16.579.664	9.414.661
19	Kab. Kudus	541.715	12.025.296	6.179.027
20	Kab. Jepara	414.366	15.402.986	8.441.623
21	Kab. Demak	426.555	14.139.061	7.815.551
22	Kab. Semarang	456.342	14.827.781	8.571.270
23	Kab. Temanggung	500.686	12.788.099	6.758.996
24	Kab. Kendal	563.799	15.686.844	8.719.061
25	Kab. Batang	371.951	12.503.182	7.275.222
26	Kab. Pekalongan	495.505	12.902.617	7.216.870
27	Kab. Pemalang	814.699	18.182.611	9.513.663
28	Kab. Tegal	651.272	18.314.391	11.072.601
29	Kab. Brebes	982.672	21.787.724	12.638.979
30	Kota Magelang	318.098	8.044.990	4.215.821
31	Kota Surakarta	2.084.198	12.105.945	6.263.630
32	Kota Salatiga	163.254	5.019.392	2.963.200
33	Kota Semarang	2.904.166	8.574.073	9.527.279
34	Kota Pekalongan	457.187	10.567.843	4.229.523
35	Kota Tegal	214.922	8.525.962	3.999.794
	Jumlah	30.952.183	511.697.782	288.607.854
	Penduduk	25.564	33.126	29.223
	Perkapita	1.211	15.447	9.876

Sumber : Jawa Tengah dalam angka Tahun 1981 s/d Tahun 2005, BPS, data diolah

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus indeks Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1981-2005 cenderung meningkat, hal ini menandakan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah yang semakin meningkat. Sebaliknya bila indeks Williamson menurun berarti ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah juga menurun. Berdasarkan tabel 5.1 selama 25 tahun pengamatan indeks Williamson yang paling rendah pada tahun 1982 sebesar 0,44 yang berarti tingkat pemerataannya mencapai 56 %. Sedangkan tingkat ketimpangan paling tinggi pada tahun 2003 yakni 0,80 yang berarti tingkat pemerataan pembangunan hanya sekitar 20 %.

Untuk investasi perkapita yang terendah pada tahun 1981 sebesar Rp 15.247; dan yang tertinggi terjadi pada tahun 1981 sebesar Rp 433.607. Dan untuk ratio angkatan kerja yang terendah terjadi pada tahun 1994 dan 1996 sebesar 46 %; sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 1990 sebesar 62 %. Selanjutnya untuk bantuan pembangunan perkapita yang terendah terjadi pada tahun 1984 mencapai Rp 704 dan yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 mencapai Rp 17.520.

Tabel 5.1
Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Dana Bantuan Pembangunan Perkapita,
Ratio Angkatan Kerja, dan Investasi Perkapita di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Indeks Ketimpangan	Investasi Perkapita (jutaan rupiah)	Ratio Angkatan Kerja (persen)	Dana Bantuan Pembangunan Perkapita (ribuan rupiah)
1.981	0,47	15.247	60	1.211
1.982	0,44	32.573	66	939
1.983	0,47	26.146	60	1.095
1.984	0,46	265.797	64	704
1.985	0,47	210.930	60	708
1.986	0,55	191.097	60	4.240
1.987	0,58	41.794	62	2.733
1.988	0,56	53.344	61	3.399
1.989	0,59	39.663	60	4.060
1.990	0,61	67.361	62	7.446
1.991	0,68	37.042	60	8.437
1.992	0,69	58.606	60	9.672
1.993	0,77	42.512	47	10.179
1.994	0,78	36.501	46	12.022
1.995	0,78	42.768	47	15.319
1.996	0,78	433.607	46	16.572
1.997	0,74	393.490	47	15.401
1.998	0,74	418.344	49	14.013
1.999	0,75	114.309	50	17.520
2.000	0,78	61.848	49	14.752

2.001	0,76	76.165	48	14.098
2.002	0,77	115.487	53	16.113
2.003	0,80	63.676	52	15.562
2.004	0,76	60.757	51	15.006
2.005	0,76	56.742	51	15.447

Sumber : BPS, data diolah.

Dengan demikian untuk realisasi dana bantuan pembangunan perkapita per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terjadi ketidakmerataan dalam kurun waktu 1981 hingga 2005. Hal ini juga terjadi pada realisasi investasi perkapita per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak merata. Dan ratio penduduk per Kabupaten/Kota relatif merata. Sedangkan tingkat ketimpangan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

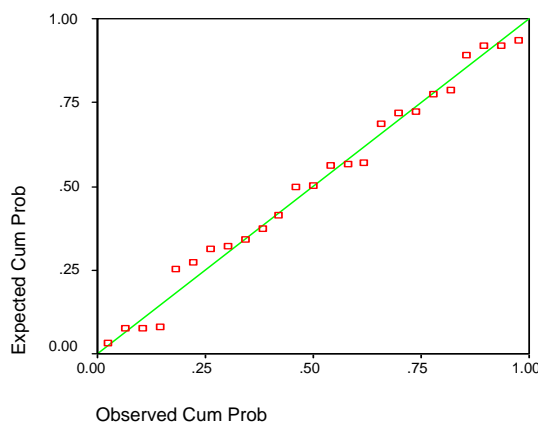
5.2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum data diinterpretasikan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar dapat diperoleh estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas

5.2. 1 Uji Normalitas Data

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot*, yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil uji normalitas dengan normal probability plot dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini:

Gambar 5.1
Uji Normalitas Data



a data dalam

5.2. 2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Multikolinierity berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variable atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Sumarno, 2003; Gujarati, 2003). Pengujian asumsi klasik Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas (Ghozali, 2005; Gujarati, 2003). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 5.2
Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Nilai VIF	Tolerance	Keterangan
Investasi Swasta Perkapita	1,091	0,917	Bebas Multikol
Rasio Angkatan Kerja Perkapita	4,085	0,245	Bebas Multikol
Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Perkapita	3,959	0,253	Bebas Multikol

Sumber : data diolah, lampiran 19.

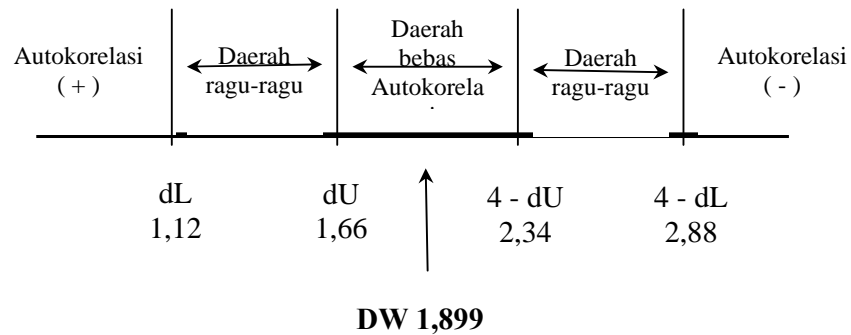
Dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10. Selain itu hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 90%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi

5.2. 3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (Gujarati, 2003). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam distorbansi atau gangguan *ui*. Dengan kata lain unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur distorbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun

Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi ini dilakukan dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson (DW test). Dari hasil perhitungan, uji mapping Durbin Watson (DW) diperoleh angka DW sebesar 1,899 (lihat lampiran SPSS). Dengan jumlah data (n) sama dengan 25 dan jumlah variabel (k) sama dengan 3 serta $\alpha = 5\%$ diperoleh angka $dL = 1,12$ dan $dU = 1,66$

Gambar 5.2
Hasil Pengujian Durbin Watson



Dari gambar 5.2 di atas terlihat nilai DW hitung terletak di antara $dU < DW < 4 - dU$ atau daerah bebas Autokorelasi, maka model dapat dikatakan tidak mengandung gejala Autokorelasi baik positif maupun negatif.

5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance term*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homokedastisitas, yaitu semua *disturbance term* mempunyai varian yang sama. Pengujian terhadap gejala Heteroskedastisitas digunakan Glejtser Test (Gujarati, 2003) yaitu dengan cara meregres nilai residual absolute (sebagai variabel terikat) dari perhitungan regresi awal dengan semua variabel bebasnya. Bila pengujian secara statistik dari hasil regresi tidak signifikan, ini berarti model tidak mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS (lihat lampiran) didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil Pengujian Glejtser

Variabel Ind	Sig.	Keterangan
Investasi Swasta Perkapita	0,052	Bebas Hetero
Rasio Tenga Kerja	0,672	Bebas Hetero
Alokasi Dana Pembangunan Perkapita	0,506	Bebas Hetero

Sumber : data diolah, lampiran 20.

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memberikan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan) sehingga disimpulkan bahwa pada model, semua variabel bebas tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

5.3. Pembahasan

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah digunakan model regresi. Hasil estimasi dari model di atas dengan bantuan software SPSS 14 ditunjukkan pada Tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Rangkuman Hasil Estimasi

Variabel Indep	Variabel Depend : Indeks Williamson (Vw)		
	Koef Regresi	Nilai t-ratio	Prob. Sig
Investasi Swasta Perkapita (X ₁)	-0,000000013	-2,362**	0,028
Rasio Angkatan Kerja (X ₂)	-0,005	-2,128**	0,045
Alokasi Dana Pembangunan Perkapita (X ₃)	0,0000016	7,184***	0,000
Konstanta	0,775	5,656***	0,000
F	104,285		
Prob. Sig.	0,000***		
R ²	0,937		
DW	1,899		
N	25		

(Sumber : data dilolah, lampiran 19)

Keterangan :

*** : Nyata pada derajat kepercayaan 99% ($\alpha = 0,01$)

** : Nyata pada derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

* : Nyata pada derajat kepercayaan 90% ($\alpha = 0,10$)

Berdasarkan hasil regresi seperti pada tabel 5.3. tersebut maka ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bila diformulasikan dalam model adalah sebagai berikut:

$$Vw = 0,775 - 0,000000013X_1 - 0,005X_2 + 0,0000016X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,775 menunjukkan nilai indeks Williamson bila variabel bebas investasi swasta, rasio angkatan kerja dan bantuan pembangunan perkapita dianggap nol.
- Koefisien regresi untuk variabel investasi swasta memberikan nilai yang negatif sebesar 0,000000013. Hal ini berarti bahwa apabila investasi swasta meningkat sebesar Rp 1 Juta perkapita, maka indeks Williamson akan menurun sebesar 0,000000013. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta yang semakin besar dan merata pada daerah di Provinsi Jawa Tengah akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan perkapita sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- Koefisien regresi untuk variabel rasio angkatan kerja memberikan nilai yang negatif sebesar 0,005. Hal ini berarti bahwa apabila rasio angkatan kerja naik sebesar 1 persen, maka indeks Williamson akan menurun sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang tinggi akan dapat menyerap angkatan kerja yang baru. Penyerapan angkatan kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa lebih besar yang kemudian mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya, dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan ekonomi akan menurun sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

- Koefisien regresi untuk variabel alokasi dana bantuan pembangunan daerah memberikan nilai yang positif sebesar 0,0000016. Hal ini berarti bahwa apabila alokasi dana bantuan pembangunan daerah meningkat Rp. 1 Juta perkapita, maka indeks Williamson akan meningkat sebesar 0,0016. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi bantuan pembangunan daerah yang semakin tinggi dan tidak merata maka akan semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena kondisi daerah yang berbeda-beda baik jumlah penduduk maupun pendapatan asli daerah maka besaran nilai bantuan pembangunan dari pusat pada masing-masing kabupaten dan kota haruslah tidak sama. Apabila besaran dana alokasi bantuan pembangunan daerah yang diberikan kepada suatu daerah dengan daerah lainnya sama, sedangkan kondisi, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah tidak sama maka hal ini akan menimbulkan kesenjangan baru karena daerah yang kaya akan makin kaya dan daerah miskin akan semakin miskin

Dari Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa secara bersama-sama/serentak (uji F) variabel bebas yang terdiri nilai investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja dan alokasi dana pembangunan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tingkat kepercayaan sampai dengan $\alpha=1\%$. Hal ini dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,01. Sedangkan secara parsial (individu variabel bebas), semua variabel bebas memberikan nilai koefisien yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-ratio masing-masing variabel bebas yang memberikan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%).

Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,937 (cukup tinggi). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,937 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan daerah sebesar 93,7% sedangkan sisanya sebesar 6,3% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

Hipotesis Pertama (H_1) menyatakan investasi swasta berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai t hitung variabel investasi swasta memberikan probabilitas signifikansi 0,028 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel investasi swasta berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan investasi swasta berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi adalah diterima.

Hipotesis kedua (H_2) rasio angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai t hitung variabel rasio angkatan kerja memberikan probabilitas signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel rasio angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan rasio tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi adalah diterima.

Hipotesis ketiga (H_3) Bantuan pembangunan Kab./Kota berpengaruh secara Negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai t hitung variabel alokasi dana pembangunan daerah perkapita memberikan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel alokasi dana pembangunan daerah perkapita berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, namun memberikan nilai yang positif. Hal ini terjadi karena alokasi dana pembangunan dari tahun ke tahun pada tiap Kabupaten/Kota tidak sama. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan alokasi dana pembangunan daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi adalah gagal diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi swasta, rasio angkatan kerja dan alokasi dana pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien dari variabel investasi swasta perkapita memiliki tanda negatif yang artinya apabila investasi swasta di provinsi Jawa Tengah meningkat maka akan mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya bila investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah menurun maka tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Tania Hastharini (2002) yang menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Persebaran kegiatan investasi yang tidak merata dapat menyebabkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk antar daerah menjadi tidak seimbang. Adanya perpindahan modal juga dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah. Di daerah yang sudah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan permintaan meningkat. Oleh karena itu peningkatan investasi diharapkan tidak hanya pada daerah-daerah yang sudah maju karena memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, namun pada daerah-daerah yang tertinggal juga perlu ditingkatkan investasinya dengan memberikan insentif investasi serta meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam investasi.

Koefisien regresi variabel rasio angkatan kerja memberikan tanda negatif yang berarti semakin meningkat rasio angkatan kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang semakin besar akan mengakibatkan variasi dan jumlah angkatan kerja meningkat. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang tinggi akan dapat menyerap angkatan kerja yang baru. Penyerapan angkatan kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa lebih besar yang kemudian mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya, dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan ekonomi akan menurun. Hasil ini

sesuai dengan penelitian Smith (2000) dan Tania Hastharini (2002) yang menyimpulkan angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Variabel Alokasi pembangunan daerah memberikan koefisien regresi positif yang berarti alokasi bantuan pembangunan daerah yang semakin tinggi dan tidak merata maka akan semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena kondisi daerah yang berbeda-beda baik jumlah penduduk maupun pendapatan asli daerah maka besaran nilai bantuan pembangunan dari pusat pada masing-masing kabupaten dan kota haruslah merata. Apabila besaran dana alokasi bantuan pembangunan daerah yang diberikan kepada satu daerah dengan daerah lainnya tidak merata maka hal ini akan menimbulkan kesenjangan baru karena daerah yang kaya akan makin kaya dan daerah miskin akan semakin miskin. Oleh karena itu pemberian alokasi dana bantuan pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi dan wilayah masing-masing daerah sehingga diharapkan kesenjangan akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Uppal dan Handoko (1986) yang menyatakan faktor yang menyebabkan kesenjangan antar daerah yaitu transfer pemerintah pusat melalui berbagai macam grant.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 menunjukkan ketimpangan semakin melebar.
2. Nilai investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan alokasi bantuan pembangunan daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan perkapita ekonomi di Provinsi Jawa Tengah baik secara parsial maupun simultan.
3. Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun.
4. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan kesempatan kerja baru dapat mengurangi ketimpangan. Hal ini karena penyerapan angkatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Alokasi dana bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang tidak merata dan daerah yang mendapat bantuan terlalu besar dapat meningkatkan tingkat ketimpangan antar daerah. Hal ini akibat pembangunan yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang masih tertinggal,

karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari daerah yang belum maju.

6. Nilai R^2 sebesar 0,937 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan daerah sebesar 93,7% sedangkan sisanya sebesar 6,3% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

Saran

Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan:

1. Meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan- kemudahan dan insentif investasi sehingga investor mau menanamkan modalnya. Investasi juga diarahkan pada daerah-daerah yang kurang maju dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung dalam berinvestasi.
2. Peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan kesempatan kerja yang lebih banyak. Tentunya dengan kegiatan investasi di atas dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja sebaiknya juga diciptakan pada semua daerah dan tidak mementingkan daerah tertentu.
3. Adanya ketimpangan pendapatan perkapita antar daerah menyebabkan pentingnya bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar daerah yang sudah maju. Agar penggunaan

dana bantuan pembangunan optimal, perlu ditingkatkan peran pengawasan baik oleh institusi yang berwenang maupun masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Achmad, Rozany Nurmanah. 1999. **Kesejangan Pengeluaran Pembangunan Antar Wilayah dan Propinsi di Indonesia**, Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XLVII, Nomor 4.
- Amirudin, Ardani. 1992. **Analysis of Regional Growth and Disparity The Impact Analysis of the INPRES Project on Indonesia Development**, a Doctor desertasion, USA : University of Pennsylvania Philadelphia.
- Anonim. 1997. **Meninjau Ulang Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**, Jurnal Bulletin Prisma, 1 Januari 1997.
- Arsyad, Lincoln, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, Ed. 3, Yogyakarta : STIE YKPN BPFE.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 1998/1999. **Kebijakan/Proyeksi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah**, Semarang. Bagian Penerbitan : Bappeda.
- Bappeda. 1999. **Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah**, Buku IV, Semarang : Bagian Penerbitan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- Bappeda. 2003. **Evaluasi Visi Rencana Strategis**, Perbaikan atas Perda No. 11 Tahun 2003, tanggal 30 Maret 2007 (Renstra) Provinsi Jawa Tengah 2003-2008, Semarang : Bagian Penerbitan : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2007.
- Barro, Robert J. 1999. Inequality, **Growth and Investment**, **National Bureau Of Economic Research**, Working Paper No. 73038, JEL No. 0413. Availabel : <http://www.nbr.org/paper/w708>.
- BPM Provinsi Jawa Tengah. 1981-2005. **Perkembangan Investasi di Provinsi Jawa Tengah**, Semarang : Bagian Penerbitan BPM Provinsi Jawa Tengah.
- Boediono. 1985. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**, Yogyakarta : BPFE-UGM

- BPS Provinsi Jawa Tengah. 1981-2005. **Pendapatan Regional Jawa Tengah**, Buku Jawa Tengah dalam angka, Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 1981-2005. **Alokasi Bantuan kepada Kabupaten/Kota**, Buku Jawa Tengah dalam Angka, Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 1981-2005, **Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah**, Buku Jawa Tengah dalam Angka, Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Demurger, Sylvie. 2000. **Infrastructure Development and Wconomic Groth : An Explanation for Regional Disparities in China**. Jurnal of Comparative Economics.29.95-117.
- Dumairy, 1999, **Perekonomian Indonesia**, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Erlangga.
- Glasson, John, 1997, **Pengantar Perencanaan Regional**, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar, 2003, **Basic Econometric**, (Fourth edition), USA, Mc Graw-Hill Internatonal.
- Hendra, Esmara. 1995. **Regional Income Disparities**, Bulletin Of Indonesia Economic Studies. Vol.XI No. 1.
- Hastarini, Tantuan, 2002, **Analisis Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah 1980-2000**, Tesis S.2 MIESP Undip Semarang (tidak dipublikasikan).
- Imam Ghozali, 2001. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS** : Universitas Diponegoro.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1987. **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta : Liberty.
- Triyanto W, Hg. Suseno, 1991, **Indikator Ekonomi**, Yogyakarta : Kansisus.
- Irwan dan Suparmoko, 1987. **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta : Liberty.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mursid, 1998, **Kajian Hubungan Fungsional Jawa Tengah – Jawa Timur dalam Pengembangan Wilayah**, Semarang : BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.
- Todaro, Michael P. 1990, **Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga**, Jakarta : Erlangga.
- Munir, Risfan, **Otonomi Daerah dan Masalah Ketimpangan Ekonomi**, <http://www.forum-inovasi.or.id>, email : inovasi@forum-inovasi.or.id.

- Richarson, Harry W, 2001, **Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional**, (diterjemahkan Paul Sitohang), Edisi Revisi 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Univesrsitas Indonesia.
- Sudibyo, Bambang dkk, 1995, **Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia**, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Aditya Media.
- Sukirno, Sadono, **Ekonomi Pembangunan**, 1985, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indinesia, Bima Grafika.
- Sjafrizal, 1997, **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.
- Sumitro, Djojohadikusumo, 1987, **Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan**, Jakarta : Bagian Penerbitan : LP3ES.
- Suryana, 2000, **Ekonomi Pembangunan-Problematikan dan Pendekatan**, Jakarta : Bagian Penerbitan Salemba Empat.
- Thee Kian Wie, 1982, **Perekonomian di Negara Berkembang**, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Tambunan, Tulus TH. 2001, **Perekonomian Indonesia**, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widiarto, 2001, **Ketimpangan, Pemerataan dan Infrastruktur**, widoarto@bandung2.wasantara.net.id

